

## RELIGIOUS TOLERANCE IN BANDA ACEH AND KEDIRI: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN DIGITAL SPACE

Mawardi<sup>1)</sup>\*, Juwaini<sup>2)</sup>, Khairil Fazal<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh-Indonesia

Corresponding Author: [mawardi.ardi@ar-raniry.c.id](mailto:mawardi.ardi@ar-raniry.c.id)

### ABSTRACT

*This research explores religious tolerance in Banda Aceh and Kediri within the context of digital space, focusing on the genealogy, contestation, and development directions of religious tolerance. The aim is to understand the social and cultural dynamics shaping patterns of religious tolerance in these regions and how digital spaces influence interfaith interactions. The methodology employed is a qualitative approach with case study methods, including in-depth interviews, social media content analysis, and participatory observation. The genealogy reveals fundamental differences between Banda Aceh, which exhibits a tolerance pattern influenced by Sharia law and strict norms, and Kediri, which is more inclusive due to its multicultural interactions. In digital spaces, religious contestation reflects tensions between conservative and progressive groups; Banda Aceh tends to uphold traditional values, while Kediri is more open to interfaith dialogue. The findings indicate that digital spaces have significant potential for fostering religious tolerance, though they are also vulnerable to hate speech and polarization. The future of religious tolerance in both regions will heavily depend on how communities and governments manage digital interactions, as well as educational efforts and policies that promote dialogue and interfaith understanding.*

**Keywords:** Religious tolerance, Digital space, Banda Aceh, Kediri

### ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi toleransi beragama di Banda Aceh dan Kediri dalam konteks ruang digital. Fokusnya adalah pada geneologi, kontestasi, dan arah perkembangan toleransi beragama di kedua wilayah. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, mencakup wawancara mendalam, analisis konten media sosial, dan observasi partisipatif. Geneologi menunjukkan perbedaan mendasar antara Banda Aceh, yang memiliki pola toleransi dipengaruhi oleh hukum syariah dan norma ketat, dan Kediri, yang lebih inklusif akibat interaksi multikultural. Di ruang digital, kontestasi keagamaan mencerminkan ketegangan antara kelompok konservatif dan progresif; Banda Aceh cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, sedangkan Kediri lebih terbuka terhadap dialog lintas agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang digital berpotensi menjadi platform penting untuk mengembangkan toleransi, meskipun rentan terhadap ujaran kebencian dan polarisasi. Masa depan toleransi beragama di kedua daerah bergantung pada bagaimana masyarakat dan pemerintah mengelola interaksi digital serta upaya pendidikan dan kebijakan yang mendorong dialog dan pemahaman lintas agama.

**Kata Kunci:** Toleransi beragama, Ruang digital, Banda Aceh, Kediri

## **Pendahuluan**

Toleransi beragama adalah landasan utama bagi keharmonisan masyarakat yang multikultural dan multiagama. Dalam era digital yang semakin maju, ruang digital telah menjadi wadah utama bagi individu untuk berinteraksi, menyampaikan keyakinan agama, dan mengakses informasi terkait agama. Namun, ruang digital juga merupakan medan pertempuran ideologi yang adakalanya dapat memperburuk ketegangan antaragama (Jusman, 2016; Sholikin, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana toleransi beragama berkembang dan berkonflik dalam ruang digital, khususnya di dua kota yang berbeda dalam konteks budaya dan agama, yaitu Banda Aceh dan Kediri.

Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, dan Kediri, sebuah kota di Jawa Timur, memiliki latar belakang budaya, agama, dan sejarah yang berbeda. Kediri dikenal sebagai kota yang beragam etnis dan kepercayaan agama, yang mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia. Sementara itu, Banda Aceh, sebagai pusat Islam di Indonesia, memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam (El-Ibrahmy, 1996). Perbedaan ini menciptakan dinamika yang unik dalam hal toleransi beragama di kedua kota ini.

Hasil penelitian yang dirilis oleh Setara Institute pada tahun 2021 menjadi sorotan penting dalam mengevaluasi kondisi toleransi beragama di Indonesia. Kota Kediri menduduki posisi yang menggembirakan sebagai salah satu dari sepuluh kota paling toleran di Indonesia. Ini menandakan bahwa di tengah keberagaman etnis dan agama yang ada, masyarakat Kediri telah berhasil menciptakan lingkungan yang saling menghormati keyakinan dan pandangan beragama satu sama lain.

Namun, hasil yang sangat kontras datang dari Kota Banda Aceh, yang menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan tingkat toleransi beragama yang paling rendah di antara kota-kota lainnya. Hal ini menjadi peringatan serius bahwa meskipun Indonesia dikenal karena tradisi toleransi beragamanya, ada tantangan yang signifikan di beberapa wilayah seperti Banda Aceh, yang perlu ditangani dengan serius.

Perbedaan besar ini antara dua kota ini dalam penilaian toleransi beragama menjadi dasar penelitian kami untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat toleransi beragama di Banda Aceh dan Kediri, khususnya dalam konteks ruang digital yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, ruang digital telah memberikan kemungkinan bagi individu untuk mengungkapkan pandangan agama mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Media sosial, blog, forum diskusi, dan platform digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi terkait agama dengan lebih mudah.

Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru dalam bentuk kontestasi ideologi, penyebaran informasi salah, serta potensi polarisasi dan konflik agama dalam ruang digital (Zuhri, 2021).

Di Indonesia, dominasi penggunaan internet atau ruang digital sangat vital perannya bagi masyarakatnya, terutama platform media sosial. Data tahun 2023 menunjukkan tren yang signifikan dalam penggunaan platform-platform media sosial di kalangan masyarakat. WhatsApp telah menempati posisi teratas, mencapai 92,1% dari total populasi dari 88,7% pada tahun sebelumnya. Instagram juga mengalami peningkatan sebesar 86,5% dibandingkan dengan 84,8% pada tahun sebelumnya. Platform lain, seperti Facebook, juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai 83,8% dari populasi dari 81,3% di tahun sebelumnya. TikTok juga mencatat lonjakan penggunaan menjadi 70,8% dari total populasi, meningkat tajam dari 63,1% di tahun sebelumnya (Press, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menjalankan analisis yang mendalam tentang toleransi beragama masyarakat di Banda Aceh dan Kediri dalam ruang digital. Penelitian ini akan mencakup aspek genealogi, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sejarah toleransi beragama di kedua kota ini, identifikasi konflik dan kontestasi yang terjadi dalam ruang digital, serta diskusi mengenai arah perkembangan toleransi beragama di masa depan.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana toleransi beragama berkembang dan berkonflik dalam era digital di dua konteks yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat toleransi beragama, meminimalkan konflik, dan mempromosikan kerukunan antaragama di Banda Aceh dan Kediri, serta menjadi kontribusi positif dalam konteks lebih luas bagi kemajuan toleransi beragama di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dengan menekankan pada pemahaman mendalam mengenai makna, konteks, dan tema yang muncul dalam interaksi digital masyarakat Banda Aceh dan Kediri (Moleong, 2021; Sugiono, 2014). Penelitian ini dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Melalui metode penelitian kualitatif yang

menghasilkan data deskriptif, fokus penelitian ini adalah Toleransi Beragama Masyarakat Banda Aceh dan Kediri di Ruang Digital: Geneologi, Kontestasi dan Arah Perkembangannya. Pendekatan ini bertujuan mendeskripsikan dan menemukan makna serta pemahaman mendalam atas masalah yang diteliti berdasarkan latar sosialnya.

Penelitian ini dilakukan secara alamiah dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaannya, dengan menekankan deskripsi secara alami. Berdasarkan pandangan Hadari Nawawi, penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau menggambarkan variabel tunggal tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain, sehingga hasil penelitian memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sebenarnya (Klopp & Mealey, 1998; Lee, 1989). Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman tentang Toleransi Beragama Masyarakat Banda Aceh dan Kediri di Ruang Digital berdasarkan sudut pandang masyarakat di lapangan, dan dari deskripsi ini ditarik pemahaman mengenai fenomena yang berkembang di masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dinamika Umat Beragama di Kota Banda Aceh**

Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya menganut Islam, memiliki sejarah panjang dalam menjaga identitas keagamaan dan budaya yang kuat. Pada saat yang sama, Kediri, sebuah kota kecil di Jawa Timur, mencerminkan keberagaman agama yang lebih luas dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun juga ada minoritas agama lain seperti Kristen dan Hindu (Tanuri, 2024).

Banda Aceh, dengan sejarahnya yang terkait erat dengan Islam dan pengalaman tsunami yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara mendalam, telah menjadi sorotan dalam kajian toleransi beragama. Masyarakatnya mengembangkan berbagai mekanisme dan praktik untuk mempertahankan identitas agama mereka sambil menjalin hubungan dengan komunitas non-Muslim, meskipun dalam konteks digital yang semakin dominan.

Di sisi lain, Kediri menawarkan perspektif yang lebih pluralistik dalam hal toleransi beragama. Meskipun mayoritas penduduknya Islam, keberadaan minoritas agama memberikan kesempatan untuk memahami dinamika interaksi antaragama yang lebih luas. Pendekatan ini semakin penting dalam konteks ruang digital, di mana teknologi dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan persepsi terhadap keberagaman (Yunanda, 2019).

Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, dikenal sebagai "Serambi Mekkah" karena peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Islam menjadi agama mayoritas di wilayah

ini dan diterapkan secara ketat melalui kebijakan syariat Islam, yang mulai berlaku resmi sejak tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Zainal, 2016). Kebijakan ini mencakup berbagai aturan yang memengaruhi aspek kehidupan sehari-hari, seperti kewajiban mengenakan busana Muslim, larangan terhadap perjudian, minuman keras, dan penegakan hukum cambuk bagi pelanggar.

Namun, meskipun Banda Aceh mayoritas penduduknya Muslim, terdapat juga komunitas agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Komunitas-komunitas ini sering menghadapi tantangan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan memperoleh izin mendirikan tempat ibadah. Proses birokrasi yang panjang dan kompleks sering kali menghambat pendirian gereja, vihara, atau pura. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi dari sebagian masyarakat dapat membuat komunitas minoritas merasa terisolasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas agama itu sendiri. Dialog antaragama sering diadakan untuk membangun pemahaman dan menghormati perbedaan. Forum-forum ini melibatkan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat umum untuk mendiskusikan isu-isu keagamaan dan mencari solusi bersama. Selain itu, pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman mulai diterapkan di sekolah-sekolah.

Pemerintah daerah juga berusaha untuk menerapkan hukum syariat Islam dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang transparan dan adil dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan rasa keadilan di antara komunitas-komunitas agama. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya toleransi beragama juga dilakukan melalui berbagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak asasi manusia dan pentingnya menghormati perbedaan agama. Salah satu contoh konkret dari upaya ini adalah proyek "Rumah Bhinneka", sebuah pusat kegiatan yang dibangun untuk memfasilitasi dialog antaragama dan kegiatan budaya. Rumah Bhinneka menyediakan ruang bagi komunitas-komunitas agama untuk berkumpul, berdiskusi, dan merayakan hari-hari besar keagamaan mereka bersama-sama. Proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah lokal dan berbagai organisasi non-pemerintah, menunjukkan komitmen bersama untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan di Banda Aceh.

Secara keseluruhan, dinamika toleransi beragama di Kota Banda Aceh mencerminkan tantangan dan upaya dalam mengelola keragaman agama di tengah penerapan syariat Islam yang ketat. Meskipun terdapat berbagai hambatan, melalui dialog, pendidikan, penegakan

hukum yang adil, dan kampanye kesadaran publik, diharapkan toleransi beragama dapat terus ditingkatkan dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola keragaman agama.

Menurut Hamid Zein, kerukunan umat beragama di Aceh sama sekali tidak terganggu. Kerukunan dan toleransi selalu berjalan dengan baik sesama umat beragama. Provinsi Aceh memiliki aneka suku dan agama serta karakter masyarakat yang terus menampilkan kerukunan dalam lintas Sejarah (Liana, 2016). Penduduk Aceh yang multikultural baik mayoritas maupun minoritas dapat hidup harmonis dan penuh toleransi di Aceh. Terkait kerukunan umat beragama di Aceh secara khusus sudah ada regulasi yang di atur dalam Undang-undang N0.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bahkan sebagai aturan pelaksana dari UUPA tersebut juga sudah ditetapkan Qanun Aceh N0.8/2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

### **Dinamika Umat Beragama di Kota Kediri**

Kerukunan umat beragama di Kota Kediri mencakup tiga aspek utama: kerukunan internal (sesama umat beragama), eksternal (antara penganut agama yang berbeda), dan hubungan antara umat beragama dengan pemerintah. Dalam konteks ini, proses akulturasi budaya sangat berperan dalam membentuk kerukunan di Kediri. Berdasarkan survei Setara Institute, Kota Kediri berada di peringkat ke-8 sebagai kota toleran di Indonesia pada tahun 2020, menunjukkan perkembangan positif dalam kehidupan beragama.

Menurut data Badan Pusat Statistik, komposisi penduduk di Kota Kediri berdasarkan agama adalah Islam 91,9%, Protestan 5,5%, Katolik 2,13%, Hindu 0,08%, Buddha 0,36%, dan lainnya (Konghucu dan Penghayat Kepercayaan) 0,034%. Mayoritas penduduk adalah Muslim, tetapi tidak terjadi diskriminasi sosial dan politik terhadap penganut agama lain. Kota Kediri memiliki berbagai organisasi dan aliran keagamaan yang diakui dan berdiri secara legal. Jumlah tempat ibadah juga mencerminkan keragaman ini. Terdapat 259 masjid, 617 mushola, 76 gereja Kristen Protestan, 3 gereja Katolik, 1 pura, dan 3 vihara. Keberadaan sarana ibadah ini menunjukkan bahwa kebutuhan beribadah setiap pemeluk agama telah difasilitasi dengan baik.

Begitu juga lembaga pendidikan, Kota Kediri memiliki 42 pondok pesantren dengan 18 satuan pendidikan, yang melayani sekitar 16.968 santri mukim dan 2.415 santri non-mukim. Selain itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan Kristen dan Katolik, seperti SMA Katolik Santo Augustinus dan SMA Kristen Petra Kediri, yang berperan penting dalam mendidik generasi muda dengan nilai-nilai toleransi.

Kediri juga memiliki tempat wisata religi yang mencerminkan keragaman agama, seperti Pondok Pesantren, situs bersejarah Setono Gedong Syekh Wasil, Makam Sunan

Geseng, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Gereja Merah, dan Pura Penataran Agung Kilisuci. Tempat-tempat ini tidak hanya menjadi pusat ibadah tetapi juga simbol kerukunan antar umat beragama. Kemudian kegiatan keagamaan di Kota Kediri berjalan secara bebas dan harmonis. Meskipun mayoritas penduduk adalah Muslim, umat beragama lain tetap dapat menjalankan kegiatan keagamaan mereka tanpa diskriminasi. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Paguyuban Antar Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan (PAUB-PK) berperan sebagai dinamisator kerukunan beragama di kota ini (Anam et al., 2019).

Selain itu juga dukungan Pemerintah daerah mendukung kegiatan FKUB, PAUB-PK, dan forum lainnya dengan memberikan bantuan anggaran. Dukungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antar umat beragama. Kehadiran Walikota Kediri dalam acara silaturahmi tokoh agama juga mencerminkan dukungan ini. Dengan dukungan pemerintah daerah, peran tokoh masyarakat dan agama, serta keberadaan organisasi lintas agama, Kota Kediri berhasil menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan toleran. Upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kerukunan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

### **Segitiga Kekuasaan Politik dalam Komunitas Mataram (Kediri)**

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, kekuatan politik di Indonesia muncul dalam format yang berbeda, yang juga memengaruhi geopolitik Mataraman di Kediri. Perbedaan ini terkait dengan perubahan peran dan fungsi beberapa kekuatan politik utama dalam menentukan proses pembuatan kebijakan negara. Kekuatan politik yang dimaksud meliputi partai politik, birokrasi pemerintah, militer, dan masyarakat itu sendiri, yaitu individu atau kelompok individu yang melembagakan hak sipil dan hak politik mereka ke dalam institusi kekuasaan politik. Fenomena ini diwakili oleh kemunculan berbagai kelompok kepentingan dalam berbagai bentuk dan karakteristik, baik organisasi profesional, organisasi keagamaan, maupun komunitas hobi lainnya. Kelompok-kelompok kepentingan ini secara sadar ingin terlibat dalam proses politik dan berupaya memengaruhi kebijakan public. Wajah baru politik Indonesia melahirkan pola-pola baru, seperti segitiga politik di Mataraman Kediri.

Segitiga kekuasaan di Kota Kediri terjadi secara bertahap; dimulai dari era reformasi dan diikuti dengan penerapan otonomi daerah dalam mengelola pemerintahan daerah yang tidak bisa dipungkiri sebagai faktor utama yang mendorong elit politik dan pemerintahan untuk berani mengambil langkah-langkah partisipatif dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat, partai politik, dan berbagai elemen sosial lainnya. Kedua, terdapat keinginan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengganti pola kepemimpinan yang ada dari atas ke

bawah dengan pola kepemimpinan yang lebih komunikatif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan mudah dan bebas. Kesadaran baru ini mulai muncul ketika Wali Kota Kediri, Ahmad Maschut, terpilih pada tahun 1998 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

Mulai tanggal 5 Maret 1998, Ahmad Maschut terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjadi Wali Kota Kediri, menggantikan Wiyoto, Wali Kota sebelumnya. Maschut dibantu oleh Bambang Edianto sebagai Wakil Wali Kota, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera dihadapkan dengan situasi sulit akibat krisis moneter dan politik yang sedang berlangsung. Pada tahun pertama pemerintahannya, Maschut lebih banyak melakukan pemetaan potensi dan bersosialisasi dengan masyarakat serta tokoh agama, politisi, dan pengusaha di Kediri. Pertemuan demi pertemuan dengan kelompok masyarakat diadakan untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka, mulai dari bidang ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan, pendidikan, kesehatan, hingga seni dan olahraga. Dalam menjalankan pemerintahan, Wali Kota Ahmad Maschut menetapkan rencana program kerja lima tahun di Kota Kediri yang diberi nama Tri Bina Kota. Melalui program ini, Maschut ingin menjadikan Kediri sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan industri, serta pusat pariwisata. Selain itu, Kediri memiliki karakteristik politik yang disebut “segitiga kekuasaan”, di mana geopolitik Kediri ditentukan oleh tiga kelas sosial.

Pertama, segitiga politik diduduki oleh elit agama. Secara historis, karakteristik Kota Kediri adalah keberadaan dan peran para tokoh agama seperti kiai, pendeta, dan ulama dalam konstelasi dan dinamika lokal, sehingga peran mereka sangat mempengaruhi pola dan hasil yang akan dicapai. Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok orang yang memiliki kualitas tertentu. Dalam perspektif sosiologis, mereka sering disebut elit. Konsepsi tentang elit ini pada dasarnya melahirkan situasi sosial baru yang mencerminkan dinamika masyarakat, karena dalam struktur masyarakat, terdapat mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Di sisi lain, hubungan antara kiai dan masyarakat telah lama dilembagakan dalam bentuk norma patron-klien. Pola hubungan ini memiliki hubungan dan peran khusus antara keduanya. Kiai adalah patron, sedangkan masyarakat adalah klien. Patron akan mendapatkan posisi khusus dalam masyarakat. Bahkan, pola patronase antara kiai dan masyarakat tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi bisa lintas wilayah, yaitu antar daerah atau bahkan provinsi.

Pengaruh kepemimpinan dan jaringan kiai yang luas memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta. Keberadaan



dan posisi kiai memudahkan mereka untuk bertindak sebagai agen dalam menyampaikan pesan-pesan pemerintah tentang Pembangunan. Menurut Dr K. H Ahmad Khalil Thahir M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Kediri:

“Secara budaya, dalam pandangan masyarakat Jawa, kiai memiliki posisi yang sangat istimewa, yaitu dihormati dan perintahnya dipatuhi. Pemerintah Kota Kediri menyadari bahwa kiai berada dalam posisi yang sangat menentukan dalam mempengaruhi tindakan masyarakat dan membimbing mereka untuk menerima langkah-langkah tertentu atau kebijakan tertentu dari pemerintah.”

Ini adalah awal dari interaksi kiai dengan pejabat pemerintah Kota Kediri. Hubungan antara kiai dan pejabat pemerintah Kota Kediri telah terjalin dengan baik, meskipun mereka memiliki peran, fungsi, dan kapasitas yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat luas.

Oleh karena itu, hubungan antara kiai dan pejabat pemerintah kota bersifat saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Hubungan ini tentu saja dianggap sangat strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan di Kota Kediri. Bahkan, kondisi ini dihargai dan diapresiasi secara luas oleh daerah lain, sehingga Kota Kediri sering mendapatkan penghargaan sebagai daerah teraman dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Selain itu, pemerintah Kota Kediri juga menerima banyak kunjungan atau studi banding dari pemerintah daerah lain untuk mempelajari kondisi stabil ini agar dapat diterapkan di wilayah mereka masing-masing.

Peran kiai di Kota Kediri, khususnya kiai dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU), sebagian besar berfungsi sebagai pendukung kebijakan pemerintah. Peran ini diwujudkan sebagai agen sosialisasi dan penyampaian program-program kepada masyarakat di tingkat akar rumput. Dukungan ini tidak hanya terkait dengan agama, tetapi juga di bidang kesehatan, menjaga persatuan dan keharmonisan, serta menyebarkan wawasan kebangsaan. Selain menjadi agen sosialisasi program-program pemerintah, peran lain dari kiai adalah sebagai mediator konflik (Subakir & Dodi, 2020). Hal ini terlihat ketika terjadi gejolak oleh para pekerja pabrik Gudang Garam yang menuntut kenaikan upah dengan melakukan demonstrasi kepada manajemen. Atas permintaan manajemen Gudang Garam kepada seorang kiai untuk menjadi mediator, gejolak demonstrasi berhasil diredam dan manajemen juga mampu memenuhi tuntutan para karyawan. Keberhasilan dalam memediasi konflik ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, kiai masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat.

Secara umum, posisi kiai di Kota Kediri masih dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai sosok yang memiliki keahlian atau keunggulan dalam pengetahuan agama dan sosial. Terkait momentum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, kiai dan tokoh agama dianggap sebagai panutan yang mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam kepentingan sesaat atau bahkan terpecah oleh perpecahan di antara mereka (Anam et al., 2019).

Selanjutnya, terkait dengan kekuatan politik ketiga, yaitu korporasi, dalam hal ini adalah keberadaan dan peran PT Gudang Garam. Dalam konsep dunia industri, hubungan antara pemerintah, manajemen korporasi, dan karyawan disebut sebagai hubungan industrial. Dalam hubungan industrial ini, pemerintah Kota Kediri, PT Gudang Garam, dan karyawan disebut sebagai pola hubungan tripartit. PT Gudang Garam adalah salah satu produsen industri rokok terbesar, yang merupakan industri kretek terbaik di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1958. Bisnis rokok ini awalnya hanya berasal dari industri rumahan yang didirikan oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Suryo Wijoyo. Saat ini, Gudang Garam telah berkembang menjadi perusahaan multinasional raksasa. Kontribusinya terhadap pendapatan bea cukai di Kota Kediri dan untuk negara menjadikannya salah satu perusahaan swasta yang paling dihormati. Jika dilihat dari sudut pandang politik, hubungan antara pemerintah Kota Kediri dan PT Gudang Garam adalah hubungan timbal balik atau hubungan simbiosis mutualisme.

Salah satu indikator dari hubungan simbiosis mutualisme ini adalah bahwa ketika terjadi konflik atau tuntutan dari karyawan untuk kenaikan upah dari manajemen perusahaan, masalah tersebut selalu berakhir dengan damai. Hal ini dapat terjadi berkat mediasi antara pemerintah Kota Kediri dan manajemen PT Gudang Garam. Di satu sisi, pemerintah kota merasa terbantu karena keberadaan Gudang Garam secara faktual sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat Kediri. Setidaknya 30.000 karyawan, beberapa di antaranya berasal dari masyarakat Kediri, bergantung pada pendapatan mereka dengan bekerja di perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta ini, pemerintah Kota Kediri selalu bertindak hati-hati, sehingga ketika terjadi masalah yang melibatkan tuntutan karyawan, mereka menyelesaikannya dengan menghindari kerusakan hubungan baik yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Kerja sama antara pemerintah daerah dan PT Gudang Garam juga dilakukan untuk mendukung program-program pemerintah baik di kota maupun kabupaten Kediri. Kerja sama semacam ini rutin dilakukan setiap tahun, yaitu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam praktiknya, pemerintah kota melalui dinas terkait mengajukan

proposal kegiatan, dan Gudang Garam akan memberikan bantuan berupa dana atau barang sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki rencana untuk kegiatan pengembangan taman kota, dan Gudang Garam memberikan bantuan berupa bangku, tempat sampah, dan kereta dorong sampah. Pada tahun 2016, Gudang Garam menjadi sponsor utama Persik, klub sepak bola andalan masyarakat Kediri. Langkah ini diambil ketika terdapat larangan bagi pemerintah daerah untuk membiayai sepak bola dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, klub sepak bola Persik sempat vakum pada saat itu karena tidak ada yang membiayai tim tersebut.

Selain itu, sebagai korporasi berskala nasional bahkan internasional, hubungan yang dibangun tidak hanya pada tingkat lokal dan provinsi, tetapi juga lebih kuat di tingkat nasional. Karena posisinya yang nasional, perusahaan ini tidak selalu menjaga jarak dari dinamika politik lokal di kota dan kabupaten Kediri sejak berdirinya. Bagi korporasi, peranan yang diambil selama ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sudah cukup untuk memberikan posisi tawar yang sangat kuat baik terhadap pemerintah daerah maupun tokoh agama/masyarakat di Kediri dan sekitarnya. Meskipun tidak mengambil langkah-langkah politik praktis, semua kebijakan dalam manajemen Gudang Garam sebenarnya memiliki dampak signifikan pada dinamika dan arah perkembangan kota dan kabupaten Kediri. Menurut Syafik Ubaidila Dosen IAIT Tribakti Lirboyo:

“Pada dasarnya Kediri memiliki sejarah panjang dalam hal keberagaman agama. Sejak zaman Kerajaan Kediri, wilayah ini sudah dikenal sebagai pusat kebudayaan dan agama, dengan adanya candi-candi Hindu dan Buddha. Perkembangan Islam di Kediri juga terjadi secara damai, di mana ajaran-ajaran agama hidup berdampingan.”

Sejarah ini membentuk fondasi bagi sikap toleran masyarakat Kediri. Dalam ruang digital, sejarah ini sering kali diangkat kembali oleh masyarakat sebagai bentuk kebanggaan terhadap keberagaman yang telah ada sejak dahulu kala.

Narasi-narasi tentang harmoni masa lalu digunakan untuk memperkuat identitas kolektif dan mempromosikan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat yang semakin plural. Namun, ruang digital juga menjadi medan kontestasi di mana berbagai pandangan dan sikap terkait toleransi beragama diperbincangkan dan sering kali diperdebatkan. Toleransi beragama di Kediri memiliki beberapa aspek unik yang membedakannya dari daerah lain.

#### 1). Sejarah dan Warisan Budaya yang Kaya

Kediri memiliki sejarah panjang sebagai pusat kebudayaan dan agama di Jawa Timur. Sejak zaman Kerajaan Kediri, wilayah ini telah menjadi tempat bertemunya berbagai agama

seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Keberadaan candi-candi, masjid, dan situs-situs bersejarah lainnya mencerminkan toleransi beragama yang telah berlangsung selama berabad-abad. Warisan budaya ini membentuk dasar bagi sikap toleran masyarakat Kediri saat ini.

## 2). Pluralitas Agama

Kediri dikenal sebagai daerah dengan keberagaman agama yang cukup tinggi. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat komunitas-komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang hidup berdampingan. Keberagaman ini menciptakan lingkungan yang mendorong masyarakat untuk saling memahami dan menghargai perbedaan, sehingga memperkuat sikap toleran.

## 3). Interaksi Sosial yang Harmonis

Masyarakat Kediri terkenal dengan budaya gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat. Nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana warga dari berbagai latar belakang agama saling membantu dan bekerja sama. Tradisi-tradisi lokal, seperti perayaan bersama hari-hari besar keagamaan, turut mempererat hubungan antarumat beragama.

## 4). Pengaruh Pesantren dan Pendidikan Agama

Kediri memiliki banyak pesantren dan lembaga pendidikan agama yang tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga nilai-nilai toleransi dan keharmonisan sosial. Pesantren-pesantren ini berperan penting dalam membentuk sikap moderat dan toleran di kalangan masyarakat. Selain itu, pendidikan agama di sekolah-sekolah juga menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai.

## 5). Peran Tokoh Agama dan Masyarakat

Tokoh-tokoh agama dan masyarakat di Kediri berperan aktif dalam mempromosikan toleransi beragama. Mereka sering kali menjadi mediator dalam konflik dan memfasilitasi dialog antaragama. Keterlibatan aktif tokoh-tokoh ini membantu menjaga stabilitas dan kerukunan di masyarakat.

## 6). Penggunaan Ruang Digital untuk Promosi Toleransi

Masyarakat Kediri cukup aktif di ruang digital, menggunakan media sosial dan platform online lainnya untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi beragama. Inisiatif-inisiatif seperti kampanye digital, diskusi online, dan penyebaran konten positif tentang kerukunan beragama menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat toleransi di era digital. Semua elemen ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan antarumat beragama, menjadikan Kediri sebagai contoh yang menarik dalam studi tentang toleransi beragama di Indonesia.

Kediri merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan pesat di Indonesia. Ada tiga faktor utama yang berperan besar dalam menjadikan Kediri hebat:

a). Peran Ulama

Ulama di Kediri memainkan peran penting dalam pendidikan agama dan penyebaran nilai-nilai moral. Pesantren-pesantren di Kediri, seperti Pondok Pesantren Lirboyo dan Al-Falah, tidak hanya fokus pada pendidikan agama tetapi juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keharmonisan sosial. Melalui dakwah dan pengajaran, ulama menanamkan nilai-nilai ini pada santri dan masyarakat luas.

b). Peran Politik

Pemerintah daerah Kediri telah menerapkan kebijakan inklusif yang mendukung keberagaman dan kerukunan antarumat beragama. Program-program pemerintah yang fokus pada pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya memastikan bahwa semua kelompok agama mendapat perhatian dan dukungan yang adil.

c). Peran Pengusaha

Pengusaha di Kediri berperan penting dalam pembangunan ekonomi lokal. Investasi dan bisnis yang mereka jalankan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengusaha juga sering terlibat dalam program-program sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh PT Gudang Garam Tbk memiliki peran krusial dalam kemajuan Kota Kediri melalui berbagai aspek, termasuk pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur, kontribusi sosial dan pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi fiskal. Sinergi antara perusahaan dan masyarakat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Kediri, menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat ekonomi dan sosial yang penting di Indonesia. Kehebatan Kediri sebagai daerah yang toleran, stabil, dan sejahtera tidak lepas dari kontribusi tiga faktor utama: peran ulama, politik, dan pengusaha. Sinergi antara ketiga faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan dan keharmonisan di Kediri.

## Kesimpulan

Toleransi beragama di Banda Aceh dan Kediri berakar dari sejarah dan budaya yang berbeda. Di Banda Aceh, penerapan syariat Islam membentuk interaksi sosial yang ketat,

dengan norma agama yang mendominasi. Penggunaan teknologi diatur secara ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip agama, meskipun ini sering membatasi kebebasan berekspresi dan dialog antaragama. Sementara itu, Kediri memiliki sejarah interaksi antaragama yang lebih inklusif, dengan warisan budaya Hindu-Buddha dan pengaruh Islam yang menciptakan pluralisme. Di ruang digital, masyarakat Kediri memiliki kebebasan lebih untuk berdiskusi, meski tetap menjaga keharmonisan.

Peran pemerintah di kedua daerah sangat penting; Banda Aceh menerapkan kebijakan ketat terkait aktivitas digital, sementara Kediri mengadopsi pendekatan yang lebih dialogis. Teknologi informasi mempengaruhi dinamika toleransi; di Banda Aceh, ia mendukung praktik syariat namun juga bisa menyebarkan intoleransi, sedangkan di Kediri, ia memperluas kebebasan berekspresi tetapi berisiko menimbulkan polarisasi. Ruang digital menawarkan peluang untuk dialog antaragama, dengan teknologi yang digunakan untuk edukasi dan kampanye positif.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform digital sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung toleransi. Sinergi antara ulama, politik, dan pengusaha di Kediri menciptakan lingkungan kondusif untuk kemajuan dan keharmonisan. Dengan sejarah dan keberagaman yang terjaga, Kediri menjadi contoh menarik dalam studi toleransi beragama di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anam, W., Subakir, A., Alamin, T., Khamim, K., Khoiri, M. A., Maufur, M., Hidayah, N., Munif, A., Samsuri, A., & Humaidi, A. (2019). *Potret Kerukunan Umat Beragama Di Kota Kediri*. IAIN Kediri Press.
- El-Ibrahimi, M. N. (1996). *Mata Rantai yang Hilang : Dari Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Aceh*. Jakarta : Grasindo.
- Jusman, A. K. (2016). Intoleransi, Radikalisme Dan Terorise Di Lamongan. *Jurnal Polinter*, 2(1).
- Klopp, B., & Mealey, L. (1998). Experimental mood manipulation does not induce change in preference for natural landscapes. *Human Nature*, 9(4), 391–399.
- Lee, A. S. (1989). Case studies as natural experiments. *Human Relations*, 42(2), 117–137.
- Liana, S. (2016). *Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha di Gampong Keudah Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Press, U. G. M. (2023). *G20 di tengah perubahan besar: momentum kepemimpinan global Indonesia?* UGM PRESS.
- Sholikin, A. (2018). INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISE DI LAMONGAN. *JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 4(1).
- Subakir, H. A., & Dodi, L. (2020). *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Gambaran Ideal Kerukunan Umat Muslim-Tionghoa di Pusat Kota Kediri Perspektif Trilogi Kerukunan dan Peacebuilding*. CV Cendekia Press.

- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Tanuri, T. (2024). Epistemologi hukum islam dalam hukum positif di indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).
- Yunanda, R. R. (2019). RADIKALISME DALAM PERSFEKTIF ISLAM DAYAH DI ACEH. *JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA (JISA)*.  
<https://doi.org/10.30829/jisa.v2i2.6383>
- Zainal, S. (2016). Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*. <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>
- Zuhri, A. M. (2021). *Beragama di Ruang Digital; Konfigurasi ideologi dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual*. Nawa Litera Publishing.